Amnesty International dan Penghapusan Hukuman Mati di Malaysia

Yanti Kristina Sianturi¹, Irza Khurun'in²
Universitas Brawijaya

ABSTRACT

Malaysia is a country where the death penalty is still present and frequently practiced. It is due to different understandings of the death penalty itself. The absence of the Malaysian government in various international human rights treaties also increases unfair trials on death row inmates. The high number of death row inmates in Malaysia represents a severe human rights violation. The abolition of the death penalty is one of the current global human rights agendas. It goes against the right to live regulated by various international human rights instruments, such as the ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) and the Declaration of Human Rights. One of the INGOs actively advocating the abolition of the death penalty in Malaysia is Amnesty International. This study looks at Amnesty International's transnational advocacy tactics in encouraging the death penalty abolition in Malaysia from 2015 to 2018. The method used is descriptive research by collecting primary and secondary data and using transnational advocacy networks by Keck and Sikkink. The results of this research show that the efforts used by Amnesty International in this advocacy include information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics.

Keywords: *Transnational advocacy network, Malaysia, Amnesty International, death penalty*

PENDAHULUAN

Pada Oktober 2018, Kabinet Pemerintahan Malaysia memutuskan untuk menghapus hukuman mati di negaranya (The Jakarta Post, 2018). Keputusan tersebut disetujui oleh Kabinet Pakatan Harapan yang dipimpin Mahathir Mohamad yang dimulai dengan moratorium eksekusi mati pada Juli 2018 dan masih dalam proses amandemen oleh Parlemen Malaysia. Penghapusan hukuman mati merupakan salah satu agenda HAM internasional saat ini. Adanya hukuman mati ini dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). Malaysia merupakan salah satu negara yang menerapkan hukuman mati (Amnesty International, 2019).

Menurut hukum HAM internasional penggunaan hukuman mati tersebut tidak memenuhi persyaratan "kejahatan paling serius". Dalam perspektif hak asasi manusia yang berlaku secara internasional, hal ini melanggar hak hidup yang merupakan fundamental rights yang dibawa manusia sejak lahir. Hak hidup diatur dalam Declaration of Human Rights atau Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 3 yakni "everyone has the rights to life, liberty and security of person" (Siswanto, 2009). Selain itu, hak hidup juga diatur dalam Pasal 6 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) dan Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights 1989 (Siswanto, nd). Selain itu, Islam atau dalam perspektif Syariah dan Barat memiliki pandangan yang berbeda dalam hak asasi manusia. Konsep HAM dalam Islam bersifat Ilahi yakni tidak dapat dinegosiasikan dan tidak dapat dengan mudah diubah-ubah. Berbeda dengan konsep HAM dalam perspektif Barat yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman dan sesuai kebutuhan manusia. Hal ini membuat adanya perdebatan dalam menilai penggunaan hukuman mati.

Menurut laporan Amnesty International, Malaysia juga menolak semua rekomendasi mengenai moratorium eksekusi dan penghapusan hukuman mati yang diberikan oleh negara – negara anggota PBB pada Universal Periodic Review yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi HAM di Malaysia. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan Malaysia dalam perlindungan HAM. Selain itu, Malaysia memiliki reputasi penjatuhan hukuman mati yang diputuskan secara rahasia. Ketidakterbukaan atau kurangnya transparansi dalam pemberian putusan hukuman mati membuat besarnya kemungkinan ada kesalahan dalam pemberian putusan.

Amnesty International juga merupakan salah satu INGO yang aktif dalam advokasi kebijakan hukuman mati di Malaysia. Menurut data Amnesty International, pada tahun 2015 terdapat 39 orang yang berada di bawah putusan hukuman mati di Malaysia (Amnesty International, 2015). Pada tahun 2016 Malaysia telah mengeksekusi sembilan orang dan terdapat 36 orang yang berada di bawah putusan hukuman mati (Amnesty International, 2016). Laporan tahun 2017, ada empat orang yang telah dieksekusi dan terdapat 38 orang yang berada di bawah putusan hukuman mati. Amnesty International menempatkan Malaysia di urutan ke-10 sebagai negara yang paling banyak menggunakan hukuman mati di antara 23 negara yang menggunakan hukuman tersebut pada tahun 2016. Sampai Oktober 2018, terdapat 1.267 tahanan hukuman mati yang 900 narapidana di antaranya dihukum karena pelanggaran terkait narkoba.

Dalam advokasinya, Amnesty International tidak sendirian dalam mendorong pemerintah Malaysia untuk menghapus hukuman mati secara penuh, Amnesty International juga bergabung dalam World Coalition Against Death Penalty yang merupakan koalisi internasional untuk menghapus hukuman mati. Selain itu, Amnesty International juga menjalin jaringan advokasi dengan FORUM-ASIA (Asian Forum for Human Rights and Development), ADPAN (Anti-Death Penalty Asia Network), dan beberapa organisasi sipil lainnya di luar Malaysia. Di Malaysia sendiri Amnesty Internasional menjalin jaringan dengan SUHAKAM (Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia), Malaysian Bar, anggota parlemen, NGO lain, dan badan-badan pemerintahan (Kaur, 2016). Pada tahun 2016, Amnesty International menjalin koalisi untuk kampanye #AbolishDeathPenalty dengan Malaysian Bar, British High Commission, Delegasi Uni Eropa di Malaysia, Kedutaan Swiss, National Human Rights Commission (SUHAKAM), Kuala Lumpur and Selangor Chinese Assembly Hall, dan Coalition for the Abolition of the Death Penalty in ASEAN (CADPA) (Malaysian Bar, 2017).

Beberapa bulan setelah adanya Konferensi organisasi sipil se-ASEAN tersebut, Pemerintah Malaysia kemudian mulai mengambil langkah serius mengenai penghapusan hukuman mati setelah mengumumkan akan melakukan amandemen rancangan undang-undang hukuman mati pada November 2015, namun baru dibahas oleh Parlemen Malaysia sejak akhir tahun 2016 (Amnesty International, 2016). Pada 10 Oktober 2018, Pemerintah Malaysia mengumumkan akan menghapus hukuman mati (Al-Jazeera, nd). Hari itu bertepatan dengan Hari Anti Hukuman Mati Dunia. Menteri Hukum Malaysia, Liew Vui Keong, mengatakan bahwa Kabinet telah setuju untuk menghapuskan hukuman mati secara penuh dan amandemen undang-undang hukuman mati tersebut yang kemudian disampaikan kepada Parlemen atau Dewan Rakyat (EJI, 2018). Sebelumnya, Malaysia telah melakukan moratorium semua eksekusi mati pada Juli 2018 sebagai langkah dalam penghapusan hukuman mati sepenuhnya yang merupakan bagian dari tuntutan Amnesty International (New York Times, 2018).

Komitmen pemerintah Malaysia terlihat sangat minim dalam menegakkan HAM di negaranya dan minimnya transparansi dalam pengambilan putusan hukuman mati. Malaysia bukan negara yang meratifikasi ICCPR dan Second Optional Protocol tapi memutuskan untuk menghapus hukuman mati pada tahun 2018 menjadi salah satu hal yang menarik

penulis. Pergerakan organisasi sipil yang bergerak dalam perlindungan hak asasi manusia juga dibatasi oleh Pemerintah Malaysia, termasuk Amnesty International (BBC, 2014). Selain itu, perbedaan nilai HAM dalam melihat penerapan hukuman mati di Malaysia yang bersumber dari hukum Syariah yang mengakui hukuman mati juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengadvokasi penghapusan hukuman mati di Malaysia yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai HAM yang bersifat universal.

Kenyataan tersebut menjadi tantangan bagi Amnesty International yang memiliki agenda utama berupa penghapusan hukuman mati di Malaysia yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM internasional. Oleh karena itu, penulis kemudian tertarik untuk mengetahui taktik advokasi yang dilakukan Amnesty International dalam mendorong pemerintah Malaysia menghapus hukuman mati pada tahun 2018. Walaupun, perubahan komitmen yang pemerintah Malaysia atas penghapusan hukuman mati tidak sepenuhnya diakibatkan oleh tekanan NGO seperti Amnesty International tetapi ada juga aktor lain. Namun, penulis disini melihat bahwa peran Amnesty International cukup kuat dalam mendorong pemerintah Malaysia untuk menghapus hukuman mati di Malaysia tahun 2018 dengan melihat respon pemerintah Malaysia dalam kebijakannya melakukan moratorium hukuman mati pada tahun 2018 yang merupakan salah satu agenda Amnesty International.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan taktik advokasi yang dilakukan Amnesty International dalam mendorong penghapusan hukuman mati di Malaysia tahun 2015-2018. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan melalui wawancara secara online dengan narasumber dan studi pustaka melalui buku, jurnal, internet, maupun media cetak lainnya. Data kemudian dianalisis secara kualitatif terkait isu hukuman mati di Malaysia dan peran serta Amnesty International.

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua studi terdahulu yang menjadi referensi utama penulis. Studi terdahulu pertama yang digunakan oleh penulis ialah jurnal dari Ni Putu Gian Linda Juwita, Ni Wayan Rainy Priadarsini, dan Putu Titah Kawitri Resen dengan judul *Upaya Cultural Framing Suara Rakyat Malaysia Untuk Mendapat Dukungan Bagi The Abolish ISA Movement* (2017) dalam Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Universitas Udayana tahun 2017. Dalam tulisan tersebut dijelaskan Malaysia merupakan salah satu negara yang masih melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia dan memiliki aturan hukum yang menjustifikasi pelanggaran HAM yakni ISA (Internal Security Act).

Adanya blokade dari pemerintah membuat SUARAM mencari dukungan dari aktor lintas batas negara. SUARAM kemudian membentuk The Abolish ISA Movement Chapter United Kingdom, The Abolish ISA Movement Chapter Sydney, kerjasama dengan The Transnational Institute dengan mempublikasi isu ISA untuk mencari dukungan yang lebih besar dari publik di luar Malaysia serta adanya desakan PBB kepada pemerintah Malaysia untuk menghapus ISA. Upaya tersebut kemudian membuahkan hasil dengan dihapusnya ISA pada tahun 2012 (Juwita, Priadarsini, dan Resen, 2017).

Studi terdahulu kedua yang penulis gunakan ialah jurnal dari Malaysian Current Law Journal yang berjudul *Capital Punishment in Malaysia and Globally: "A Tool for Justice or a Weapon Against Humanity"* oleh Guru Dhillon, Dr Nor Mohammad, dan Ng Yih Miin tahun 2012. Literatur ini membahas mengenai situasi hukuman mati di Malaysia dan berbagai perspektif mengenai hukuman mati. Jurnal ini menjelaskan bahwa hukuman mati sebenarnya tidak pernah terbukti efektif dalam mengurangi kejahatan, malah hukuman mati merupakan hukum yang melanggar hak asasi manusia yakni hak untuk hidup.

Dalam perspektif legal, baik dalam Konstitusi Malaysia dan hukum HAM internasional, hukuman mati melanggar hak hidup. Dalam Konstitusi Malaysia sebenarnya

telah mengatur hak hidup yakni Pasal 5 ayat 1 Konstitusi Malaysia sehingga hukuman mati sebenarnya bertentangan dengan Konstitusi Malaysia. Selain itu, hukuman mati juga bertentangan Declaration of Human Rights Pasal 21, ICCPR dan Second Optional Protocol yang ketiganya belum diratifikasi oleh Malaysia. Sementara dari perspektif religius yakni dari pandangan Islam, Kristen dan Buddha yang merupakan tiga agama resmi dan terbesar di Malaysia terutama Islam yang banyak mempengaruhi hukum-hukum di Malaysia. Selanjutnya, diambil dari pandangan global mengenai hukuman mati. Di Malaysia sendiri banyak pemimpin yang merasa tidak setuju akan penerapan hukuman mati ini, seperti anggota Parlemen Bukit Bendera di Penang, Liew Chin Tong yang menyatakan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang kejam terhadap hak asasi manusia dan para terpidana sebenarnya dapat dihukum melalui hukuman seumur hidup tanpa harus mencabut nyawanya (Dhillon, Mohammad, dan Miing, 2012).

Berangkat dari dua literatur tersebut, penelitian ini akan berfokus pada hukuman mati di Malaysia, Amnesty International sebagai aktor advokasi, dan taktik yang dilakukan oleh Amnesty International dalam mendorong penghapusan hukuman mati di Malaysia

Transnational Advocacy Network (TAN)

Konsep *Transnational advocacy network (TAN)* dipengaruhi oleh pendekatan sosiologi yang fokus pada interaksi kompleks antar aktor, pada negosiasi dan fleksibilitas identitas dan pada kepentingan serta kerangka intersubjektif pembingkai suatu pemahaman. Konsep ini kemudian juga menjelaskan pengaruh konstruktivisme dalam menjelaskan fenomena transnasionalisme dalam hubungan internasional yang terus berkembang. Adanya pengaruh konstruktivisme dalam jaringan advokasi transnasional ditunjukkan dengan adanya norma, ide atau prinsip, keyakinan yang sama dalam pembentukan suatu jaringan (network) (Keck dan Sikkink, 1999). Hal ini menjadi perhatian para peneliti konstruktivis dalam teori hubungan internasional dan teori gerakan sosial dalam perbandingan politik. Penekanan peran dari nilai-nilai dalam jaringan bersifat konsisten dengan beberapa argumen dalam literatur gerakan sosial baru.

Dalam jaringan advokasi transnasional, jaringan (networks) sendiri diartikan sebagai bentuk dari komunikasi antar aktor yang bersifat sukarela, sejajar dan terorganisir sehingga walaupun banyak aktor yang terlibat namun kesemuanya memiliki posisi yang sama dalam mengadvokasi sebuah isu (Keck dan Sikkink, 1998). Dalam jaringan advokasi transnasional ini tidak ada sistem hierarki karena semuanya memiliki kepentingan yang sama dalam memperjuangkan sebuah isu. Pertukaran informasi yang dimiliki antar aktor merupakan kekuatan utama mereka dalam mempengaruhi aktor pembuat kebijakan yang menjadi target mereka. Hal ini karena aktivis dalam jaringan advokasi transnasional tidak memiliki kekuatan seperti kekuatan militer dan kekuatan ekonomi yang dimiliki negara. Melakukan pertukaran dan persebaran informasi ini adalah hal yang paling memungkinkan dipakai oleh jaringan aktivis yang berguna untuk mengumpulkan fakta-fakta kuat untuk menekan pemerintah.

Keck dan Sikkink juga tidak menjelaskan pengertian advokasi dalam konsep ini. Penulis mengambil pengertian advokasi menurut *The Advocates for Human Rights*, salah satu NGO HAM asal Amerika Serikat, advokasi adalah serangkaian tindakan terorganisir yang bertujuan mempengaruhi kebijakan publik, perilaku sosial atau proses politik. Proses advokasi melibatkan sejumlah tindakan yang dirancang secara strategis untuk menghasilkan perubahan di berbagai level. Advokasi dapat berupa pemberian dukungan terhadap suatu kebijakan dan membujuk penguasa untuk mendukung kebijakan di tingkat lokal, nasional dan internasional, mencari dan menggunakan power yang lebih kuat untuk mempengaruhi tindakan politik dan mengorganisir upaya untuk mempengaruhi perumusan dan

implementasi kebijakan dengan membujuk dan menekan otoritas negara, lembaga internasional dan aktor penting lainnya (The Advocates for Human Rights, nd).

Transnational advocacy network merupakan kerangka konseptual yang dibuat oleh Margareth Keck dan Kathryn Sikkink dalam melihat aktivisme yang sebagian besar dalam bidang hak asasi manusia, isu persamaan hak-hak pada perempuan, dan perlindungan lingkungan hidup. Keck dan Sikkink menggambarkan jaringan advokasi transnasional sebagai interaksi antar aktor-aktor terkait yang bekerja secara internasional mengenai suatu isu yang sama sehingga memiliki keterikatan akan nilai-nilai bersama yang diwujudkan melalui adanya diskusi, dialog serta pertukaran informasi.

Risse dan Sikkink berargumen bahwa tujuan jaringan advokasi transnasional ialah untuk mempengaruhi norma internasional yang kemudian dapat mengubah perilaku masyarakat dan politik domestik (Risse, 1999). Difusi norma-norma dan nilai-nilai internasional sangat bergantung pada jaringan aktivis yang membentuk dan menyebarkan norma tersebut di antara para aktor domestik dan transnasional yang terhubung dalam rezim internasional, misalnya nilai-nilai hak asasi manusia, lingkungan dan sebagainya (Risse et al., 1999). Jaringan advokasi ini kemudian melakukan framing issue di suatu negara untuk mudah dipahami oleh target audiens, menarik perhatian dan mendorong aksi, serta mencari arena atau institusi yang cocok untuk membawa isu dari negara asal. Maksud dari framing issue ialah upaya strategis untuk membentuk pemahaman bersama mengenai suatu isu serta untuk memotivasi terbentuknya tindakan kolektif (Keck dan Sikkink, 1998). Framing merupakan komponen penting dalam taktik politik jaringan advokasi transnasional. Strategi framing ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman antar aktor baik individu dan kelompok dengan membuat suatu tindakan yang berkesan.

Transnational advocacy network akan muncul ketika : (1) saluran antara kelompok domestik dan pemerintah di suatu negara diblokade atau tidak bisa diakses atau adanya saluran yang tidak efektif dalam menyelesaikan suatu masalah;(2) aktivis atau pelaku politik percaya bahwa perluasan jaringan – jaringan akan dapat melanjutkan misi-misi maupun kampanye mereka dan juga akan mempromosikan jaringan yang lebih banyak lagi;(3) konferensi dan bentuk-bentuk lain dari koneksi internasional membuat arena untuk membentuk dan memperkuat jaringan.³⁸

Dalam tulisan Keck dan Sikkink ini, aktor utama dalam transnational advocacy network, antara lain: (1) NGO lokal dan internasional; (2) gerakan sosial lokal; (3) yayasan; (4) media; (5) gereja, kamar dagang, organisasi konsumen, para ahli; (6) badan-badan organisasi pemerintahan regional dan internasional; (7) badan-badan eksekutif maupun parlemen dalam pemerintahan.

Transnational advocacy network akan muncul ketika : (1) saluran antara kelompok domestik dan pemerintah di suatu negara diblokade atau tidak bisa diakses atau adanya saluran yang tidak efektif dalam menyelesaikan suatu masalah;(2) aktivis atau pelaku politik percaya bahwa perluasan jaringan – jaringan akan dapat melanjutkan misi-misi maupun kampanye mereka dan juga akan mempromosikan jaringan yang lebih banyak lagi;(3) konferensi dan bentuk-bentuk lain dari koneksi internasional membuat arena untuk membentuk dan memperkuat jaringan (Keck dan Sikkink, 1999).

Namun, tidak semua upaya dalam perjuangan keadilan atau gerakan sosial dapat disebut dengan jaringan advokasi internasional. Jaringan advokasi internasional akan terjadi jika partisipasi politik atau tuntutan masyarakat yang dibawa dalam arena hukum dibatasi oleh pemerintah. Adanya batasan tersebut kemudian disebut dengan blokade. Adanya blokade yang dilakukan pemerintah inilah yang membuat adanya gerakan yang dilakukan aktivis. Upaya yang atau gerakan yang dilakukan kemudian diperkuat dengan mencari dukungan atau aliansi dari luar negaranya. Jaringan yang dimiliki di lingkup internasional ini kemudian

memperkuat posisi aktivis maupun NGO domestik dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hal tersebut kemudian dijelaskan oleh Keck dan Sikkink dalam suatu pola bernama *Boomerang Pattern*.

Gambar 1: Boomerang Pattern

Sumber: Keck and Sikkink, 1999

Boomerang Pattern yang digunakan sebagai pola atau saluran jika adanya blokade antara pemerintah dan aktivis. Hubungan dan interaksi antar aktor dalam jaringan advokasi internasional dijelaskan dalam Boomerang Pattern. Dalam Boomerang Pattern, ketika pemerintah melanggar atau menolak untuk mengakui hak-hak dari individu maupun kelompok di negaranya bahkan seringkali tidak ada diberikan jalan dalam arena politik maupun hukum, maka aktivis atau NGO domestik akan mencari perhatian internasional untuk mengekspesikan isu mereka dan bahkan melindungi hak mereka.⁴¹ Aktivis domestik yang diblokade pemerintah dalam mengungkapkan permasalahan mereka kemudian mencari koneksi internasional untuk memberi tekanan pada pemerintah.

Jaringan ini sangat penting untuk aktivis atau NGO yang kurang kuat sehingga adanya jaringan ini menyediakan akses, pengaruh dan informasi bahkan dana yang tidak bisa didapatkan sendiri. Pada isu-isu dimana pemerintah tidak mendengarkan tuntutan masyarakat, maka menjalin koneksi dengan komunitas internasional merupakan jalan yang dipilih untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam pola Boomerang Pattern tersebut dapat dilihat NGO atau aktivis dari suatu negara yang tuntutannya diblokade pemerintah melakukan interaksi atau mencari dukungan dengan NGO di luar negeri. Antar NGO ini kemudian saling mendukung dengan saling bertukar sumber daya yang mereka punya terutama informasi.

Keck and Sikkink: 4 Tactics used by TAN

Keck dan Sikkink ingin memperlihatkan bahwa politik global tidak hanya dimainkan oleh negara (state-centric). Dalam penjelasan Keck dan Sikkink mengenai transnational advocacy network, Keck and Sikkink ingin memperlihatkan bahwa kelompok advokasi transnasional juga memainkan peran yang penting dalam politik global. Dalam tulisan Keck and Sikkink dijelaskan beberapa hal dalam melihat seberapa besar pengaruh jaringan atau untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam advokasinya. Besarnya pengaruh advokasi tersebut dapat dilihat dari tingkatan pengaruh jaringan berikut: Pertama, pembuatan isu dan agenda setting. Adanya jaringan dapat mempengaruhi dan meningkatkan perhatian publik

mengenai isu yang diadvokasi melalui berbagai media. Masuknya isu yang sebelumnya tidak mendapat perhatian publik menjadi isu yang dibahas oleh publik maupun aktor target merupakan salah satu ukuran keberhasilan dari advokasi. Kedua, posisi pengaruh di negara, organisasi regional dan organisasi internasional. Ketiga, pengaruh dalam prosedur internasional. Keempat, pengaruh perubahan kebijakan pada aktor target. Kelima, pengaruh pada perilaku negara. Adanya jaringan advokasi transnasional baik di level negara, organisasi regional dan organisasi internasional sangat membantu dalam mempengaruhi dan membujuk negara target untuk mengubah posisi atau kebijakannya. Bahkan dapat lebih jauh lagi yakni mengikat negara target tersebut untuk mempertahankan keputusannya.

Dalam *Activist Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* (1999) terdapat empat taktik yang digunakan oleh Margareth E. Keck dan Kathryn Sikkink yakni:

a. Information Politics

Information politics atau politik informasi merupakan kemampuan dalam menggunakan informasi secara efektif dan kredibel sehingga memiliki dampak yang besar oleh aktor TAN.⁴⁴ Aktor non-negara meningkatkan pengaruhnya dengan menyajikan sumber-sumber alternatif informasi. Aktor jaringan kemudian menyajikan informasi dalam bentuk fakta dan testimoni yang dapat dibuktikan dan diverifikasi kebenarannya.

Para aktivis kemudian membingkai atau melakukan framing isu yang mereka bawa dengan tujuan untuk meyakinkan masyarakat dan mendorong mereka untuk melakukan aksi nyata. Adanya penggunaan framing issue ialah agar isu yang dibawa mudah dipahami oleh target audiens, menarik perhatian dan mendorong aksi, serta mencari arena atau institusi yang cocok untuk membawa isu dari negara asal.

b. Symbolic Politics

Symbolic politics merupakan kemampuan atau taktik yang digunakan aktor TAN dalam membingkai isu dengan cara memberikan penjelasan melalui penggunaan simbol, tindakan atau cerita yang masuk akal atau kuat sehingga mempercepat perkembangan jaringan advokasi. Interpretasi simbolik ini merupakan bagian dari proses persuasi melalui jaringan yang tujuannya untuk menciptakan kesadaran (awareness) dan meningkatkan pengaruh mereka.

c. Leverage politics

Leverage politics ialah taktik oleh aktor TAN untuk mempengaruhi aktor atau negara target secara efektif sehingga mengubah kebijakannya.⁵¹ Agar dapat dikatakan efektif, aktor TAN memerlukan bantuan dari aktor yang memiliki power yang kuat yang dapat mempengaruhi situasi atau kebijakan di negara target. Untuk mengubah suatu kebijakan dalam suatu negara, jaringan aktivis perlu memberi tekanan dan meyakinkan beberapa aktor-aktor berpengaruh. Pembahasan leverage politik terdiri atas dua yakni material leverage dan moral leverage.

Material leverage adalah usaha yang dilakukan jaringan transnasional untuk memperoleh dana ataupun bantuan material, seperti kerjasama diplomatik atau bantuan ekonomi tetapi juga dapat berupa voting dalam lembaga internasional atau bantuan lainnya, yang ditujukan untuk membuka kesempatan negosiasi antara pihak mengenai isu yang diperjuangkan. Isu HAM menjadi isu yang menarik ketika pemerintah atau lembaga internasional menghubungkan praktik – praktik HAM dengan bantuan militer dan ekonomi ataupun dengan hubungan diplomatik.

Sedangkan moral leverage ialah usaha jaringan advokasi transnasional untuk memperoleh dukungan moral dari aktor yang lebih powerful dalam melakukan shaming/mobilization of shame terhadap perilaku aktor target dan mengangkat isu yang diadvokasi menjadi perhatian internasional. Setiap perilaku aktor atau negara

target dibuat menjadi sorotan atau perhatian internasional. Dukungan moral dari aktor yang berpengaruh ini dapat dijadikan sebagai power dengan asumsi bahwa negara target akan mempertimbangkan pendapat dari aktor tersebut dan jaringan (networks) yang terlibat dapat menunjukkan bahwa suatu negara melanggar kesepakatan internasional atau tidak memenuhi janjinya dalam isu yang diadvokasi tersebut.

d. Accountability politics

Accountability politics ialah upaya yang dilakukan aktor TAN (transnational advocacy networks) agar para aktor yang kuat atau berpengaruh di negara target terus menerus bertanggungjawab dan menerapkan kebijakan atau norma yang telah disetujui secara formal atau resmi. Jaringan (networks) berusaha untuk membuat suatu statement yang telah dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak dlanggar atau diubah kembali. Jaringan juga menekan pemerintah melalui norma-norma internasional yang telah ditetapkan. Hal ini perlu dilakukan karena pemerintah sering tidak konsisten dan menyetujui perubahan kebijakan untuk mengalihkan perhatian publik dan jaringan (networks) sementara terhadap suatu isu.

Begitu pemerintah menyetujui suatu norma internasional atau mengeluarkan statements atau pernyataan resmi, maka jaringan berusaha untuk langsung mengikat pemerintah agar tetap konsisten. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas persetujuan mengenai perubahan kebijakan dapat dilakukan menggunakan kekuatan hukum atau mekanisme legal yang mengikat. Konsep keempat taktik oleh Keck dan Sikkink ini kemudian akan dioperasionalisasikan dalam menganalisis data yang didapat tentang Amnesty International dalam rangka advokasi penghapusan hukuman mati yang diterapkan di Malaysia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Hukuman Mati di Malaysia

Malaysia merupakan negara yang berbentuk monarki konstitusional yang dikepalai oleh Sultan dengan kepala pemerintahan yakni Perdana Menteri (CIA, nd). Malaysia juga merupakan negara multirasial dimana Islam sebagai agama resmi (*Religion of the Federation*) (Mohammad, 2017). Konstitusi Malaysia menganut dualisme sistem peradilan yang unik yakni hukum sekuler (sipil, kriminal, dan hukum publik) yakni hukum Inggris dan hukum Syariah (International Business Publication, 2014). Namun, Malaysia bukan negara yang sepenuhnya Islam walaupun beberapa kelompok konservatif memandang Islam sebagai salah satu pilar terpenting bagi negara Malaysia. Di negara yang mayoritas Muslim, penerapan hukum Syariah mendapat berbagai respon dari masyarakat sipil. Ada perdebatan mengenai ketidakcocokan antara hukum Syariah dengan kebebasan dan nilai-nilai hak asasi manusia yang sekuler terutama masalah penerapan hukuman mati di Malaysia.

Malaysia merupakan salah satu negara dari 15 negara yang masih menggunakan hukuman mati dalam beberapa jenis kejahatan sampai tahun 2018 walaupun tidak ada bukti konkrit bahwa penerapan hukuman mati dapat menurunkan tingkat kejahatan. Hukuman mati diterapkan di Malaysia sejak tahun 1970an akhir atau 1980an awal yang awalnya diterapkan pada pelanggaran penyalahgunaan senjata api pada Firearms Penalty Act dan Internal Security Act (Han, Ying, dan Arivananthan, 2018). Malaysia kemudian menerapkan hukuman mati pada pelanggaran penyalahgunaan narkoba pada tahun 1983 seiring dengan trend dunia yakni “war on drugs”.

Adapun jenis-jenis kejahatan yang menerapkan hukuman mati sebagai hukuman wajib (mandatory death penalty offences) yakni pengkhianatan atau pemberontakan terhadap Yang di-Pertuan Agong, Pemerintah, atau Yang di-Pertuan Negeri (Pasal 121 KUHP),

melakukan tindakan terorisme (Pasal 130C KUHP), pembunuhan (Pasal 302 KUHP), percobaan pembunuhan atau tindakan yang mengakibatkan kematian (Pasal 307 Ayat 2 KUHP), penyanderaan (Pasal 374A KUHP), perkosaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 376 Ayat 3 KUHP), perdagangan narkoba (Pasal 39B Dangerous Drugs Act 1952, dan pelanggaran terkait penggunaan senjata api (Pasal 3, 3A, dan 7 Firearms Act 1971). Selain kategori mandatory di atas, ada juga beberapa kategori kejahatan yang dapat dikenai hukuman mati, yakni mencoba atau mengupayakan perang melawan Yang di-Pertuan Agong, Pemerintah, atau Yang di-Pertuan Negeri (Pasal 121 KUHP), pemberontakan (Pasal 132 KUHP), penculikan dengan tujuan meminta tebusan/kidnapping (Pasal 364 KUHP), perampokan berkelompok yang disertai pembunuhan (Pasal 396 KUHP), abduction/penculikan melalui penipuan (UU Penculikan 1961, Pasal 3 Ayat 1), dan tindakan bunuh diri oleh anak di bawah umur atau orang kelainan jiwa (Pasal 364 KUHP) (Harring, 1991)..

Disebutkan oleh Amnesty International, dalam hukum pidana Malaysia, khususnya dalam kasus pembunuhan tidak memberikan opsi atau pilihan bagi keluarga korban untuk meminta kompensasi (diyyah) atau memaafkan tersangka. Dalam hukum pidana Malaysia, setelah seseorang dinyatakan bersalah atas berbagai kejahatan tersebut, orang tersebut akan dikenakan hukuman mati kecuali permohonannya untuk banding disetujui. Pihak yang berhak memberi putusan dan pengampunan akan hukuman mati ialah Yang Di-pertuan Agong (Raja) dan Sultan dari setiap negara bagian. Kuasa tersebut diatur dalam Pasal 42 Konstitusi Federal Malaysia.

Dikutip dari website resmi *Malaysia Federal Constitution*, sebenarnya Konstitusi Malaysia juga melindungi hak hidup dan kebebasan pribadi dari warga negaranya yang diatur dalam Pasal 5 Konstitusi Federal Malaysia. Namun, dalam Pasal 5 ayat 1 menyatakan “Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya atau kebebasan pribadinya, asalkan diakui oleh hukum”. Jadi, selama suatu kejahatan sesuai dengan prosedur penuntutan, hukuman mati tetap dapat diterapkan. Namun, sistem pemberian putusan hukuman mati di Malaysia sendiri masih belum transparan sehingga masih terdapat kesalahan yang berakibat fatal kepada terpidana hukuman mati yakni eksekusi mati. Dalam penjelasan sebelumnya, hukum Syariah menjadi dasar hukum dari Malaysia yang mengakui penerapan hukuman mati. Ada tiga jenis yakni hukuman mati sebagai bentuk penalti hudud, qisas (pembalasan) dan hukuman ta’zir (diskresi) (Aziz, 2015). Dalam hudud mencabut hidup seseorang tidak diperbolehkan kecuali karena tiga hal, yakni ketika membunuh orang lain, ketika melakukan perzinahan sesudah menikah, dan ketika murtad. Dalam pemberian hukuman mati juga disebutkan bahwa pembuktian dilakukan tanpa ada keragu-raguan dan jika buktinya jelas yang disebut dengan yaqin. Hukuman mati tidak dapat dilakukan jika masih ada keragu-raguan atau bukti yang kurang jelas (idra’ al-hudud bi alshubhah). Pemberian putusan hukuman mati hanya bisa diterapkan jika ada bukti yang kuat. Namun, kenyataannya dalam pemberian putusan hukuman mati di Malaysia, Amnesty International menemukan bahwa pemerintah tidak transparan. Putusan hukuman mati sangat bersifat rahasia di Malaysia. Ketika mengeksekusi mati, baik terpidana, keluarga, dan pengacaranya pun tidak diberikan informasi apa pun. Masih ditemukan kesalahan-kesalahan atau unfair trial dalam pemberian putusan, seperti dalam kasus Hoo Yew Ah dan kasus-kasus lainnya (ADPAN, nd).

Dalam qisas, hukuman mati diterapkan sebagai bentuk dari pembalasan, misalnya dalam kasus pembunuhan, keluarga korban dapat menuntut balas. Qisas dan diyyah merupakan hukuman yang ditentukan dalam hukum Syariah. Hukuman tidak dapat dilakukan oleh orang lain atau bahkan oleh negara kecuali oleh korban atau ahli waris hukumnya.

Sementara dalam ta’zir, negara diberikan otoritas dalam memberikan putusan atau hukuman termasuk penggunaan hukuman mati. Otoritas negara dapat memberikan hukuman

mati jika suatu kejahatan dianggap mengganggu kepentingan publik. Namun, ada juga pendapat bahwa hukum yang dibuat manusia tidak dapat dilakukan lebih kejam dari hukuman yang terdapat dalam Quran atau Sunnah. Oleh karena itu, sebenarnya hukuman mati tidak dianjurkan atau bukan menjadi pilihan utama.

Penerapan hukuman mati di Malaysia ini tentunya bertentangan dengan HAM internasional, yang terdapat dalam Declaration of Human Rights Pasal 3 yang menyatakan bahwa *“everyone has the rights to life, liberty and security of person”*. Hak hidup juga diatur dalam ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights). Dalam ICCPR Pasal 6 dikatakan bahwa setiap manusia memiliki hak hidup yang bersifat melekat atau inheren yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.⁷¹ Secara spesifik, penghapusan hukuman mati dibahas dalam Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) merupakan hukum HAM internasional yang secara spesifik bertujuan untuk menghapus hukuman mati (Aswidah, 2016). Dalam pembukaannya menyatakan bahwa penghapusan hukuman mati berkontribusi pada peningkatan martabat manusia dan perkembangan hak asasi manusia secara progresif.

Menurut Amnesty International, beberapa alasan yang mendorong diharuskannya penghapusan hukuman mati antara lain: (1) Hukuman mati merupakan hukuman yang tidak dapat dikembalikan atau dibatalkan jika sudah dilakukan eksekusi dan sangat besar kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pemberian putusan. (2) Hukuman mati tidak memberikan efek jera atau menurunkan tingkat kejahatan. (3) Hukuman mati sering digunakan pada sistem peradilan yang masih berat sebelah. Terdapat banyak kasus dimana orang-orang diberi putusan hukuman mati dengan bukti yang masih kurang, proses peradilan yang tidak adil (*unfair trial*), dan adanya penyiksaan. (4) Hukuman mati bersifat diskriminatif karena biasanya dilakukan pada orang-orang yang memiliki latar belakang ekonomi dan sosial yang kurang mampu atau berasal dari kalangan minoritas. (5) Hukuman mati digunakan sebagai alat politik.

PBB juga membuat panduan yang membatasi penggunaan hukuman mati yang diatur dalam *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty (Economic and Social resolution 1984/50 of 25 May 1984)* atau 39 Jaminan Perlindungan bagi mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984) agar lebih banyak negara menghentikan praktik ini (ICOMDP, 2013).

Sedangkan Malaysia tidak menandatangani dan meratifikasi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan *Second Optional Protocol to the ICCPR*. Posisi Malaysia seperti ini menyulitkan untuk membuat Malaysia patuh terhadap nilai-nilai HAM universal. Dalam komitmennya mengenai perlindungan hak asasi manusia, Malaysia hanya menandatangani Deklarasi Hak Asasi Manusia (Declaration of Human Rights) yang tidak cukup kuat untuk meminta pertanggungjawaban Malaysia secara hukum. Selain itu, Malaysia hanya meratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), CRC (Convention on the Rights of the Child), dan CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) berdasarkan data PBB yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan hukuman mati.

Malaysia memiliki nilai-nilai sendiri yang dipengaruhi oleh Hukum Syariah yang dianut oleh Malaysia. Titik debat antara penerapan dan penghapusan hukuman mati ini ialah adanya perbedaan nilai-nilai HAM antara communal value (nilai-nilai komunal) masyarakat Malaysia dengan universal value (nilai-nilai HAM secara universal). Masyarakat Malaysia lebih mengutamakan hak-hak komunal daripada hak-hak individual seperti yang terdapat dalam berbagai instrumen HAM internasional. Pemerintah Malaysia, terutama pada masa pemerintahan Mahathir Mohamad memandang adanya ketidakcocokan antara nilai-nilai

Barat dengan *Asian Values* yang dianut Malaysia dimana hak asasi manusia merupakan bentuk lain dari kolonialisme yang tidak sesuai dengan budaya lokal (Nordin, 2010).

Blokade Penghapusan Hukuman Mati di Malaysia

Dalam advokasi penghapusan hukuman mati, NGO-NGO ataupun organisasi yang mengadvokasi penghapusan hukuman mati seperti Amnesty International mendapat beberapa hambatan. Dalam boomerang pattern Keck and Sikkink dijelaskan bahwa advokasi transnasional akan muncul jika tuntutan masyarakat akan suatu isu diblokade oleh pemerintah. Negara yang seharusnya sebagai pelindung HAM, malah menjadi pelaku pelanggaran HAM di negaranya. Hal ini pun terjadi di Malaysia dalam isu hukuman mati dimana adanya pelanggaran dan pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia.

Hambatan yang pertama adalah kondisi politik di Malaysia. Sejak merdeka dari tahun 1957 sampai tahun 2018, Malaysia dikuasai oleh koalisi politik yang sama yakni dikuasai selama 61 tahun oleh koalisi Barisan Nasional (Partai United Malays National Organization/UMNO dan koalisi partainya) yang kemudian dikalahkan oleh koalisi Pakatan Harapan pada Pemilu 2018 (Nadzri, 2018). Karena penguasa yang sama, akibatnya Malaysia menghasilkan kebijakan dan situasi yang tidak berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya termasuk dalam kebijakan perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah Malaysia masih tetap membungkam kritik dari masyarakat sipil terhadap pemerintah terutama dari NGO (non-governmental organization) yang ada di Malaysia. Dari Koalisi Barisan Nasional sampai berganti menjadi Koalisi Pakatan Harapan pun, pemerintah masih belum kooperatif terhadap organisasi sipil yang ada di Malaysia.

Amnesty International dan beberapa organisasi sipil di Malaysia yang tergabung dalam COMANGO (Coalition of Malaysian NGOs) tidak diberikan izin oleh Pemerintah di Malaysia. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Malaysia, hal itu karena organisasi – organisasi yang tergabung dalam COMANGO dianggap menyebarkan nilai-nilai liberal Barat yang bertentangan dengan ajaran tradisional Islam yang dianut Malaysia. Dalam pencarian data mengenai situasi hukuman mati, Shamini Darshni (Direktur Eksekutif Amnesty International Malaysia) menjawab sesi wawancara:

"Where we have countered some resistance is from the Prison Department, under the Home Ministry, which has declined requests to visit death row inmates or have a discussion about prison conditions where death row inmates are concerned."

Departemen Lembaga Pemasyarakatan Malaysia tidak mengizinkan adanya kunjungan terhadap terpidana hukuman mati dan selalu menolak diskusi mengenai kondisi penjara dimana terpidana terkait. Hal tersebut menyimpulkan bahwa Pemerintah Malaysia tidak kooperatif dalam isu ini, Pemerintah masih menutupi fakta yang terjadi pada narapidana hukuman mati. Selain itu, menurut Wakil Sekretaris Kebijakan, Hukum dan Keluhan SUHAKAM (Komisi HAM Malaysia) juga menambahkan bahwa tantangan terbesar dari penghapusan hukuman mati di Malaysia ialah masih adanya beberapa pejabat-pejabat negara yang percaya bahwa hukuman mati dapat mengurangi kejahatan dan penghapusan hukuman mati bertentangan dengan hukum Syariah (FORUM-ASIA, 2015). Menurut ADPAN, agama terutama hukum Syariah masih memegang peranan penting di Malaysia. Campur tangan dalam urusan tersebut akan dianggap mengganggu filosofi agama dan anti-Islam sehingga tidak banyak politisi atau pejabat yang menyuarakan isu tersebut. Sebagai negara yang masih semi demokratis, pemerintah masih memiliki kekuasaan yang sangat besar di Malaysia.

Kedua, ketidakberpihakan undang-undang atau peraturan yang ada di Malaysia juga menjadi hambatan bagi Amnesty International dan jejaringnya. Peraturan-peraturan tersebut menyulitkan organisasi-organisasi HAM untuk menyuarakan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Malaysia dan semakin mempermudah pemerintah membatasi

pergerakan organisasi sipil di Malaysia dengan adanya legitimasi berupa peraturan tersebut. Malaysia dulunya memiliki ISA (Internal Security Act) yang kemudian diubah menjadi SOSMA (Special Offences/Special Measures Act) pada tahun 2012 (Juwita, Priadarsini, dan Resen, 2017) Namun, tetap memiliki fungsi yang sama yang mengizinkan otoritas Malaysia untuk melakukan penahanan sewenang-wenang terhadap pihak-pihak yang dianggap bertentangan dengan kepentingan negara tanpa melalui prosedur pemeriksaan yang resmi.

Peraturan-peraturan yang memberikan Batasan terhadap pergerakan sipil, antara lain *Peaceful Assembly Act* yang membatasi aksi massa, membatasi publikasi yang dianggap mencemarkan nama baik pemerintah, *Evidence Act*, dan khususnya *Sedition Act* yang digunakan untuk membatasi dan menahan pihak-pihak yang mengkritik isu-isu sensitif terutama isu agama dan isu politik (Freedom House, 2019).

Menurut laporan Freedom House, dalam Pasal 10 Konstitusi Federal, kebebasan berekspresi dan berkumpul atau kebebasan berasosiasi dijamin namun tetap saja dibatasi oleh pemerintah. Kebanyakan media dikuasai oleh partai atau bisnis yang memiliki afiliasi dengan pemerintah sehingga sulit untuk menyuarakan isu hukuman mati di Malaysia.

Selain dari pemerintah, hambatan pada penghapusan hukuman mati di Malaysia juga berasal dari masyarakat yang masih memandang hukuman mati merupakan hukuman yang wajar. Dalam survey berjudul *Death Penalty Project* tahun 2013, mayoritas masyarakat Malaysia pun setuju dengan penerapan hukuman mati (Hood, 2018). 74%-80% setuju penerapan hukuman mati pada kasus penyalahgunaan narkoba, dan 83% setuju pada kasus penyalahgunaan senjata api. Hal ini membuat tantangan bukan hanya dari pemerintah Malaysia, namun juga dari masyarakat Malaysia yang belum memiliki pemahaman yang benar mengenai hukuman mati yang bertentangan dengan prinsip dasar atau universal hak asasi manusia.

Amnesty International dan Advokasi Penghapusan Hukuman Mati di Malaysia

Amnesty International telah aktif mengadvokasi penghapusan hukuman mati sejak tahun 1977 dan merupakan organisasi non-pemerintahan pertama yang memasukkan penghapusan hukuman mati sebagai agenda utamanya. Menurut narasumber selaku Executive Director Amnesty International Malaysia, Amnesty International memulai advokasi mengenai penghapusan hukuman mati di Malaysia sudah sejak berdirinya Amnesty International di Malaysia yakni tahun 1998. Amnesty International merupakan salah satu international non-governmental organization (INGO) yang berpusat di London.⁹⁹ Amnesty International didirikan oleh pengacara berkebangsaan Inggris bernama Peter Benenson yang mengadvokasi dua pemuda Portugis yang dipenjara di Inggris melalui kampanye internasional. Amnesty International dapat didefinisikan sebagai gerakan global yang digerakkan lebih dari 7 juta orang yang berkampanye dengan visi agar hak asasi manusia dirasakan oleh semua orang seperti yang terdapat dalam Declaration of Human Rights dan standar HAM internasional lainnya. Ada sekitar 8.000 grup yang tergabung dalam Amnesty International termasuk kelompok lokal, kelompok pemuda atau pelajar serta kelompok profesional di 80 negara. Selain di London, Amnesty International juga membuka perwakilan atau kantor regional di berbagai benua.

Amnesty International merupakan organisasi yang bersifat independen dan tidak memihak organisasi atau pihak manapun. Pendanaan advokasi yang dilakukan Amnesty International sebagian besar dibiayai oleh sumbangan atau donasi pendukungnya dari seluruh dunia. Amnesty International juga merupakan salah satu NGO (non-governmental organization) yang memperoleh status konsultatif dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sehingga memiliki hak spesial untuk mengikuti setiap sidang atau konferensi internasional

yang diadakan PBB, berpartisipasi dalam kinerja PBB dan menyuarakan kepentingannya di setiap sidang formal PBB (UN, nd).

Dikutip dari website resmi Amnesty International, tujuan advokasi organisasi tersebut antara lain: 1. Berkontribusi pada kepatuhan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia sebagaimana yang diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia 2. Memperoleh pembebasan pada tahanan tidak bersalah, pengadilan yang adil dalam batas waktu yang wajar bagi tahanan politik, untuk menghapuskan hukuman mati, penyiksaan, dan perlakuan buruk terhadap tahanan, dan mengakhiri pembunuhan atas dasar politik dan penghilangan paksa 3. Menentang pelanggaran berat terhadap hak setiap orang baik fisik maupun mental terlepas dari pertimbangan politik apapun 4. Melawan pelanggaran serius mengenai hak setiap orang untuk mengekspresikan keyakinannya dan bebas dari diskriminasi gender, ras dan kebangsaan 5. Mengembangkan kinerja dalam insiden-insiden faktor-faktor ekonomi dalam ranah hak asasi manusia, memerangi impunitas, melindungi para pembela HAM, perlindungan pengungsi dan penguatan basis organisasi.

Ada tiga agenda HAM utama Amnesty International di Malaysia yakni penghapusan hukuman mati, penghentian penyiksaan (torture), dan kebebasan berekspresi. Ada dua goals dari advokasi Amnesty International di Malaysia dalam isu hukuman mati menurut narasumber Lily Jamaluddin: *"Amnesty International Malaysia's goals are twofold: changing legislation, and influencing public opinion. We often mobilise the public through awareness campaigns, but we are also aware that at times, protective human rights legislations must be made before public consensus."*

Dalam penghapusan hukuman mati di Malaysia, Amnesty International aktif melakukan kampanye publik pada kasus-kasus eksekusi yang akan sedang terjadi terutama sebelum adanya moratorium eksekusi mati pada tahun 2018 dan menyoroti kasus-kasus hukuman mati di luar Malaysia untuk membantu menciptakan kesadaran tentang ketidakadilan dan ketertutupan eksekusi mati di Malaysia. Ada dua tujuan utama Amnesty International dalam advokasi penghapusan hukuman mati di Malaysia yakni mengubah undang-undang dan mempengaruhi opini publik. Melalui upaya advokasi, Amnesty International Malaysia telah melakukan dialog dengan pemerintah tentang perlunya menghapuskan hukuman mati secara total. Shamini Darshni (Direktur Eksekutif Amnesty International) menyatakan:

"Through advocacy efforts, we have held dialogues with the government on the need to abolish the death penalty in totality. Through the office of the Minister of Law within the Prime Minister's Department, we have engaged with the different Ministers under the current and previous administrations on the need to abolish the death penalty once and for all. We believe, that through our efforts, along with the efforts of other civil society organisations, we have impressed upon the government the necessity to abolish the death penalty."

Melalui Kementerian Hukum, Amnesty International berusaha untuk melibatkan pemerintah melalui kementerian Hukum dan kementerian lainnya serta mempengaruhi pemerintah mengenai perlunya menghapus hukuman mati selamanya. Amnesty International dan jejaringnya berusaha untuk menciptakan arena internasional dalam mengadvokasi penghapusan hukuman mati di Malaysia. Amnesty International mengkampanyekan penghapusan hukuman mati di Malaysia dalam berbagai konferensi internasional bersama beberapa organisasi lainnya, yakni ASEAN Civil Society Conference/ ASEAN People's Forum 2015 dengan tema Death Penalty In Southeast Asia: Towards A Regional Abolition yang diorganisir oleh Amnesty International Malaysia, FORUM-ASIA, KontraS Jakarta, Think Centre, dan Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN). Konferensi internasional ini bertujuan untuk mendesak pemerintah negara-negara ASEAN segera memberlakukan moratorium penggunaan hukuman mati yang bertujuan untuk menghapuskan penggunaan hukuman mati secara sepenuhnya yang merupakan bentuk pelanggaran atas hak hidup.

Amnesty International melihat bahwa saat ini gerakan masyarakat sipil di Asia sangat berkembang dalam penghapusan hukuman mati. Forum – forum internasional tersebut merupakan sebagai simbol gerakan global kampanye anti hukuman mati untuk menunjukkan dukungan internasional bagi Malaysia menjadi negara yang juga menghapuskan penerapan hukuman mati.

Taktik Advokasi Amnesty Internasional tentang Penghapusan Hukuman Mati di Malaysia

Amnesty International berperan sebagai organisasi internasional non-pemerintahan yang memperjuangkan hak asasi manusia sebagai nilai dari organisasi tersebut. Advokasi yang dilakukan Amnesty International maksudnya ialah seperangkat aktivitas yang dilakukan Amnesty International yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik, perilaku sosial, dan proses politik di Malaysia terkait penghapusan hukuman mati sejak tahun 2015-2018. Advokasi yang dilakukan Amnesty International tersebut kemudian akan dijelaskan melalui empat taktik advokasi transnasional dari Margareth Keck dan Kathyryn Sikkink.

Secara garis besar, advokasi Amnesty International dalam mendorong penghapusan hukuman mati di Malaysia berdasarkan konsep *Transnational Advocacy Network* dapat dilihat melalui gambar bagan berikut.

Gambar 3: Strategi advokasi penghapusan hukuman mati di Malaysia

a. Information Politics

Taktik politik informasi (information politics) merupakan upaya yang digunakan Amnesty International dalam mengelola informasi secara efektif untuk mencapai tujuan dari advokasi yang dilakukan. Tujuan Amnesty International adalah mengubah undang-undang dan opini publik. Untuk mewujudkannya, Amnesty International menggunakan politik informasi. Dalam information politics ini akan melihat kemampuan Amnesty International dan jaringannya untuk menghasilkan informasi anti-mainstream yang tidak bisa atau sulit didapatkan dari pemerintah resmi.

Pertama, dalam mengumpulkan fakta mengenai situasi hukuman mati setiap tahunnya Amnesty Internasional yang menentang kebijakan hukuman mati melakukan research di setiap negara termasuk di Malaysia. Dari research tersebut kemudian Amnesty

International kemudian mengumpulkan fakta mengenai situasi hukuman mati di Malaysia dalam bentuk laporan, seperti *Death Sentences and Executions report* yang dirilis setiap tahun.

Laporan ini mencakup penggunaan hukuman mati dari Januari sampai Desember setiap tahunnya. Informasi dalam report tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber, yakni dari orang-orang yang dijatuhi hukuman mati atau wali/keluarga terpidana mati, report dari organisasi lainnya, dan laporan media (Amnesty International, 2015). Amnesty International hanya menyampaikan laporan dari sumber yang dapat dikonfirmasi kebenarannya mengenai eksekusi, hukuman mati atau aspek-aspek lain mengenai penerapan hukuman mati. Laporan-laporan tersebut disajikan dalam bentuk yang menarik baik berupa grafik ataupun narasi sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Dalam *Death Sentences and Executions report*, Malaysia termasuk negara-negara yang menjadi fokus Amnesty International sebagai negara yang mewajibkan hukuman mati pada beberapa kategori kejahatan. Dalam laporan tersebut, jumlah terpidana mati di Malaysia meningkat setiap tahunnya dan terdapat beberapa kali eksekusi mati sejak tahun 2015-2017. Pada tahun 2018 tidak ada eksekusi mati karena Pemerintah Malaysia memorandum hukuman mati pada Juli 2018. Data mengenai terpidana mati dan eksekusi mati dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Jumlah eksekusi mati dan terpidana hukuman mati di Malaysia 2015 - 2018

Tahun	Eksekusi Mati	Terpidana Hukuman Mati
2015	-	39
2016	9	36
2017	4	38
2018	0	190

(Sumber: Hasil pengolahan penulis dari Amnesty International Death Sentences and Executions Report 2015-2018)

Penyampaian death sentences and executions report secara berkala yakni setiap tahun ke masyarakat ini menjadi taktik Amnesty International untuk terus menghidupkan isu hukuman mati di Malaysia meskipun pemerintah telah berganti dari koalisi Barisan Nasional ke koalisi Pakatan Harapan. Selain membuat laporan, mengenai hukuman dan eksekusi mati di Malaysia, Amnesty International juga mempublikasi research lainnya dan berita mengenai hukuman mati di Malaysia secara online di website nya sehingga mudah untuk diakses publik. Semua informasi tersebut dapat diakses di website resmi Amnesty International, baik website Amnesty International pusat (<https://www.amnesty.org/en/>) dan Amnesty International Malaysia (<http://www.amnesty.my/>). Hal ini kemudian dapat dikatakan sebagai cara taktis Amnesty International untuk mempermudah publik atau masyarakat luas mengakses informasi penerapan hukuman mati yang tidak disediakan dan dirahasiakan pemerintah.

Dalam Keck and Sikkink, informasi merupakan hal yang penting dalam kesatuan jejaring.¹¹⁵ Dalam jaringan advokasi transnasional terjadi pertukaran informasi. Dalam memperluas jaringan advokasi, Amnesty International juga melakukan pertukaran informasi dengan organisasi lain. Dalam melakukan pertukaran informasi, Amnesty International bergabung dengan NGO atau organisasi lainnya dalam membuat laporan mengenai fakta situasi hukuman mati di Malaysia. Oleh karena itu, Amnesty International bergabung dengan Harm Reduction International (HRI) dan World Coalition Against the Death Penalty (WCADP) dalam membuat laporan tahunan mengenai fakta situasi hukuman mati terhadap

terpidana mati kasus narkoba di Malaysia yang dipublikasi dalam bentuk *The Death Penalty for Drug Offences: Global Review* (Harm Reduction International, 2015).

Kedua, ialah testimoni. Dalam research yang dilakukan oleh Amnesty International selain memaparkan fakta yang terjadi mengenai situasi hukuman mati di Malaysia, informasi juga dipaparkan agar lebih nyata dalam bentuk testimoni yang lebih menggugah perasaan publik dan meningkatkan awareness public mengenai hukuman mati di Malaysia.

Menurut Lily Jamaluddin (Campaigner Amnesty International), testimoni dikumpulkan dengan cara mewawancarai keluarga korban dan pengacara korban untuk memahami kasus yang terjadi dan mencari cara yang tepat dan dapat digunakan untuk mengkampanyekan kasus tersebut. Adanya testimoni dari korban atau keluarga korban ini dapat berguna untuk semakin meyakinkan atau memframing masyarakat bahwa terjadi hukuman mati yang proses peradilannya tidak adil (*unfair trial*), kerap terjadi penyiksaan dan ancaman dari otoritas yang berkuasa kepada korban, dan sasarannya yang kebanyakan masyarakat kelas ekonomi rendah di Malaysia.

Ketiga, *framing*. Informasi dalam bentuk fakta dan testimoni yang didapatkan Amnesty International kemudian dijadikan alat framing. Media merupakan alat *framing* yang cukup efektif. Amnesty International menggunakan media yang dapat menyampaikan informasi yang telah dikelola secara lebih luas terutama bagi massa atau publik yang berada pada jarak jauh mengingat pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah terhadap pergerakan organisasi sipil. Media memiliki peran besar dalam menjaga public discourse tentang hukuman mati yang harus dihapuskan untuk tetap menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah dan mempromosikan nilai-nilai HAM yang bertentangan dengan penerapan hukuman mati. Media juga digunakan sebagai alat framing karena dapat mengemas informasi menjadi lebih menarik dan mudah dibaca yang kemudian dapat menarik perhatian publik serta memiliki lebih banyak audiens untuk dijangkau.

Narasumber juga memaparkan bahwa Amnesty International memanfaatkan semua media di Malaysia, baik media mainstream maupun alternatif dalam meningkatkan perhatian masyarakat mengenai isu hukuman mati. Amnesty International tidak memiliki kriteria dalam memilih media mana yang akan diajak kerjasama dalam advokasinya. Media yang sering melakukan publikasi mengenai situasi hukuman mati di Malaysia, antara lain Malay mail, Malaysiakini, dan New Strait Times yang merupakan media lokal online berbahasa Inggris. Media-media ini lah yang sering digunakan Amnesty International dalam meningkatkan perhatian dan dukungan publik terhadap penghapusan hukuman mati di Malaysia. Media-media utama Malaysia tersebut diperlukan untuk mengkonstruksi (memframing) opini publik Malaysia akan penggunaan hukuman mati di Malaysia. Framing dilakukan dengan menampilkan artikel-artikel yang menyoroti penerapan hukuman mati Malaysia sebagai pelanggaran HAM dan harus segera dihapuskan oleh pemerintah Malaysia.

b. Symbolic Politics

Politik simbolik merupakan taktik yang dilakukan Amnesty International melalui aksi-aksi simbolik atau narasi apapun yang dapat memframing atau menggambarkan tuntutan penghapusan hukuman mati dan hukuman mati di Malaysia yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia terutama hak hidup. Informasi yang telah dikumpulkan divisualisasikan atau disimbolisasikan oleh Amnesty International dan organisasi lain yang menjadi partner atau jaringan Amnesty International.

Simbolisasi lain yang dilakukan Amnesty International ialah dengan melakukan kampanye dengan organisasi lain dan membentuk koalisi yang ditujukan untuk masyarakat luas. Amnesty International dan koalisinya meluncurkan kampanye *#AbolishDeathPenalty* pada tahun 2016 yang bertujuan untuk menyelaraskan pemikiran atau persepsi publik yang

salah mengenai hukuman mati. Dari wawancara dengan Shamini Darshni (Direktur Eksekutif Amnesty International Malaysia) dan Lily Jamaludin (Campaigner Amnesty International Malaysia), anggota dari koalisi kampanye ini berasal dari dalam dan luar Malaysia antara lain *Malaysian Bar, Amnesty International, Kuala Lumpur and Chinese Assembly Hall, British High Commission, Uni Eropa, Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM), Kedutaan Swiss, Abolition of the Death Penalty in ASEAN (CADPA), Asia Centre* dan juga didukung oleh *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) (The Malaysian Bar, 2016)*. Kampanye ini merupakan salah satu instrumen masyarakat sipil untuk menyuarakan tuntutan mereka pada pemerintah.

Aksi pertama dilakukan di Kuala Lumpur and Selangor Chinese Assembly Hall, pada 9 sampai 10 Oktober 2016. Mulai 10 Oktober 2016 koalisi ini kemudian juga melakukan kampanye di sosial media dengan menggunakan tagar atau hashtag *#AbolishDeathPenalty* dan membuat poster dan logo kampanye *#AbolishDeathPenalty*. Tanggal 10 Oktober dipilih karena bertepatan dengan Hari Anti Hukuman Mati se-Dunia.

Selain itu, aksi simbolik lainnya yang dilakukan dalam bentuk letter-writing campaign yakni membuat petisi online kepada Pemerintah Malaysia yang momentumnya bertepatan dengan Hari Anti Hukuman Mati se Dunia yakni 10 Oktober untuk menghapuskan hukuman mati dan mendesak pergantian hukuman mati Shahrul Izani Suparman.

Shahrul Izani dikenakan hukuman mati atas kasus perdagangan narkoba pada tahun 2009. Shahrul dinyatakan bersalah pada usia 19 tahun karena membawa obat-obatan terlarang di sepeda motor yang baru saja ia kirim ke seorang teman. Kampanye dilakukan dengan bentuk simbolik yakni penggunaan tali untuk hukum gantung karena Malaysia menggunakan hukum gantung dalam eksekusi mati dan menggunakan penutup mata yang menyimbolkan sikap pemerintah yang seakan “tutup mata” akan masalah yang ada.

Kampanye juga dilakukan secara global. Salah satu kampanye global yang berhasil ialah kampanye global Shahrul Izani. Kampanye ini tidak hanya melibatkan Amnesty International tetapi juga menjadi salah satu fokus utama World Coalition Against the Death Penalty (WCADP) yang merupakan koalisi anti-hukuman mati sedunia dan organisasi lokal baik di dalam dan luar Malaysia.¹³⁴ Kampanye dilakukan di berbagai negara, seperti kampanye yang dilakukan Amnesty International Benin dan IproDAH disimbolisasikan melalui flashmob dengan artis lokal Benin untuk mendorong kampanye pengampunan Shahrul Izani, Amnesty International Zimbabwe dan ZACRO yang mengumpulkan tandatangan bagi petisi pengampunan Shahrul Izani, Amnesty International Kanada melalui letter-writing campaign: "Act Now! Sign the Petition addressed to Malaysia".

Lalu, Amnesty International Finlandia melalui kampanye and petisi lewat SMS untuk Shahrul Izani, Amnesty International Norwegia melalui pengumpulan tandatangan petisi sebanyak 19.000 tandatangan untuk Shahrul Izani, Amnesty International Inggris melalui kampanye untuk Shahrul Izani, Amnesty International Trinidad dan Tobago melalui pengumpulan lebih dari 100 tandatangan untuk Shahrul Izani, kampanye Amnesty International Jerman yang berhasil mengumpulkan 600 tandatangan untuk Shahrul Izani (WCADP, 2015). Aksi lainnya juga disimbolisasikan melalui venue atau forum internasional yang bertujuan untuk meningkatkan public awareness mengenai penerapan hukuman mati yang masih terjadi di Malaysia.

Kemampuan politik simbolik (symbolic politics) ditunjukkan Amnesty International dalam taktik kampanyenya terhadap masyarakat luas. Penerapan hukuman mati yang terjadi di Malaysia diubah menjadi masalah internasional yang kemudian dikampanyekan di seluruh dunia melalui berbagai aksi. Masyarakat yang berada di belahan dunia lain menerima informasi Amnesty International kemudian menginterpretasikannya dalam berbagai aksi dan turut merasakan bahwa masalah pelanggaran HAM berupa hukuman mati di Malaysia

merupakan masalah bersama. Kasus Shahrul Izani kemudian berhasil diubah hukumannya pada Desember 2016

c. Leverage Politics

- Material Leverage

Material leverage dapat dikatakan sebagai dukungan dalam bentuk materil atau dalam bentuk vote dalam forum internasional. Dalam hal materil, menurut nara sumber, Amnesty Internasional relatif independen karena tidak menerima bantuan dari pemerintah, afiliasi partai politik maupun perusahaan. Amnesty International hanya menerima bantuan dana dari beberapa donatur internasional yang sifatnya terbatas karena sifat Amnesty International yang independen. Menurut data dari Amnesty International Malaysia, walaupun Amnesty International telah memiliki kantor lokal di Malaysia, sumber pendanaan dalam operasionalisasinya Amnesty International Malaysia tetap berasal dari Sekretariat Amnesty International di London, Inggris. Sumber penerimaan Amnesty International salah satunya berasal dari iuran anggota Amnesty International yang berasal dari seluruh dunia. Menurut data Amnesty International, 95 % sumber pendanaan berasal dari iuran wajib empat juta anggota Amnesty International yang berada di seluruh dunia. Dukungan dana dapat dikatakan bentuk dukungan paling nyata yang diterima aktor NGO. Berikut merupakan donatur terbesar Amnesty International selain anggota mulai tahun 2015-2017:

Donor 2015-2017
American Academy of Forensic Science
DFID
EEJ (Education, Empowerment, and Justice)
FORD FOUNDATION
Norwegian Telethon 2013-2017
OSF Human Rights Initiative
OSF International Migration
Swedish Postcode Lottery
Swiss Major Donors-Crisis
Open Society Foundation
Comic Relief
Humanity United
Dutch Postcode Lottery
Benetech
Oak Foundation
CAF
Anker Peterson
American Council of Learned Societies
Nick Helldorf Trust
Stanley Thomas Johnson Foundation
UK Gift Aid

Sumber: Hasil Pengolahan penulis dari Amnesty International Limited 2015-2017 Income Report.

Tabel 1.3

- Moral Leverage

Moral leverage merupakan taktik yang digunakan untuk menekan aktor yang target melalui aktivitas shaming atau mobilisation of shame yakni dalam forum-forum pengawasan internasional. Menurut Keck dan Sikkink, advokasi yang dilakukan akan lebih efektif jika menyangkut prestige atau martabat suatu negara. Sebagai INGO (International Non-Governmental Organization) yang mempunyai status konsultatif di PBB, Amnesty International juga memanfaatkan hal tersebut dalam advokasi penghapusan hukuman mati di Malaysia. Moral leverage kemudian didapatkan dari fakta yang diungkap oleh Amnesty

International dengan penyampaian fakta kepada pengawasan internasional ini menjadi bentuk mobilisation of shame dalam forum PBB. Kesempatan tersebut pun didapatkan melalui aktor yang lebih kuat yakni atas bantuan perwakilan Amnesty International di PBB. Hal tersebut dilakukan bukan untuk menjelekkan negara Malaysia, namun lebih untuk meningkatkan kesadaran publik secara internasional mengenai penerapan hukuman mati yang masih terjadi di Malaysia.

Dalam hal ini, pada April 2016 di kantor PBB New York, Amnesty International kemudian mempresentasikan mengenai situasi hukuman mati, kampanye Shahrul Izani dan eksekusi tersembunyi di Malaysia. Amnesty International menyoroti kegagalan pemerintah Malaysia dalam mengamandemen undang-undang hukuman mati yang terus mundur. Presentasi ini merupakan moral leverage negara-negara anggota PBB untuk mendukung penghapusan hukuman mati dan mendesak pemerintah Malaysia menghapus hukuman mati di negaranya (Amnesty International Facebook, 2019).

Amnesty International memiliki nilai yang sama dengan Uni Eropa dan adanya pemikiran yang sama (principle ideas) untuk menghapus hukuman mati. Uni Eropa kemudian menjadi partner penting Amnesty International, terutama dari Prancis, Spanyol, Finlandia, Inggris dan Swiss dalam advokasi isu hukuman mati di Malaysia.

Tekanan dan bukti dukungan negara-negara Eropa juga diperlihatkan melalui Third Cycle Universal Periodic Review atau Putaran Ketiga Sidang HAM Tahunan Dewan HAM PBB pada November 2018. Dalam Universal Periodic Review terakhir tahun 2018, kebanyakan rekomendasi berasal dari negara-negara Eropa. Negaranegara Eropa menganjurkan Malaysia untuk segera menghapus hukuman mati secara penuh. Negara-negara yang memberi rekomendasi antara lain Portugal, Moldova, Rumania, Spanyol, Finlandia, Montenegro, Ukraina, Albania, Cyprus, Georgia, Prancis, Jerman, Italia, Swiss, Swedia, dan Norwegia (UN, 2018).

Dalam taktik ini, taktik leverage politics yang paling terlihat ialah moral leverage dengan melakukan mobilization of shame terhadap pemerintah Malaysia dalam forum-forum atau komite internasional. Tekanan dari luar Malaysia ini sangat dibutuhkan mengingat kondisi dalam negeri Malaysia yang kurang mendukung penghapusan hukuman mati.

d. Accountability Politics

Politik akuntabilitas ini merujuk pada kemampuan dalam menjaga komitmen dan pertanggungjawaban pemerintah atau aktor target atas kebijakan atau keputusan yang telah dilakukan terkait isu yang diadvokasi. Secara sederhana, aktor jaringan berfungsi memantau kesesuaian antara wacana dan praktik dari keputusan yang telah dilakukan aktor target. Dalam memantau kesesuaian antara praktik dan wacana pemerintah Malaysia mengenai agenda penghapusan hukuman mati yang telah ada sejak 2015, Amnesty International membuat annual reports serta submission reports mengenai situasi hukuman mati di Malaysia terutama setelah pemerintah Malaysia memutuskan untuk mengamandemen undang-undang hukuman mati sejak tahun 2015 sampai keputusan resmi untuk menghapuskan hukuman mati pada tahun 2018. Pembuatan annual reports dalam bentuk death sentences and death execution report yang dipublikasikan setiap tahun dan submission reports yakni Amnesty International Submission for the UN Universal Periodic Review setiap lima tahun sekali merupakan cara Amnesty International untuk menjaga konsistensi Pemerintah Malaysia mengenai keputusan penghapusan hukuman mati dan komitmen Pemerintah Malaysia atas Deklarasi Hak Asasi Manusia (Declaration of Human Rights) yang telah ditandatangani pemerintah Malaysia.

Lalu, Amnesty International juga mengeluarkan public statement terkait niat dan konsistensi Pemerintah Malaysia dalam menghapus hukuman mati sejak resmi diumumkan untuk diamandemen pada November 2015 dan moratorium Juli 2018 sebagai langkah besar

penghapusan hukuman mati sepenuhnya. Amnesty International meminta Pemerintah Malaysia untuk tetap konsisten terhadap agenda penghapusan hukuman mati terutama pada Kabinet Pakatan Harapan yang berjanji menghapus hukuman mati pada kampanyenya. Janji tersebut dimuat dalam dokumen Buku Harapan: Rebuilding Our Nation Fulfilling Our Hopes yang berisi lima pilar, 10 janji dalam 100 hari, 60 janji dalam lima tahun, dan lima janji khusus.¹⁵³ Salah satu diantara janjinya ialah mencabut hukuman mati pada semua kategori kejahatan yang terdapat dalam undang-undang Malaysia (Amnesty International, 2018).

Namun, taktik ini menurut penulis tidak terlalu maksimal digunakan karena Pemerintah Malaysia tidak terikat dengan hukum-hukum internasional, seperti ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) dan Second Optional Protocol yang secara spesifik mengatur mengenai hukuman mati. Celah untuk membatalkan keputusan menghapuskan hukuman mati atau melanggar komitmen masih besar. Hal ini ditambah dengan sejumlah peraturan di Malaysia yang melegitimasi pemerintah untuk menindak tegas kelompok-kelompok atau individu yang mengkritik pemerintah dan membatasi pergerakan organisasi anti hukuman mati sehingga pengawasan dan tuntutan pertanggungjawaban akan komitmen pemerintah untuk menghapus hukuman mati masih kurang vokal. Hal ini dibuktikan dengan Parlemen yang masih belum melakukan amandemen mengenai penghapusan hukuman mati. Perkembangan dalam keputusan penghapusan hukuman mati masih stagnan yakni tetap pada tahap moratorium eksekusi mati.

KESIMPULAN

Amnesty International merupakan salah satu International Non-Governmental Organization (INGO) hak asasi manusia yang memiliki pengaruh dalam mendorong penghapusan hukuman mati di Malaysia. Amnesty International telah mengadvokasi penghapusan hukuman mati di Malaysia sejak tahun 1998 yang merupakan agenda utama Amnesty International di Malaysia. Walaupun advokasi sudah dilakukan sejak lama, namun masih ada hambatan dalam advokasi penghapusan hukuman mati di Malaysia. Hambatan itu datang dari pemerintah Malaysia yang kebanyakan masih menganggap hukuman mati dapat memberikan efek jera bagi kejahatan ditambah adanya hukum Syariah yang mengatur mengenai hukuman mati membuat pejabat atau politisi tidak berani mengkritik penerapan hukuman mati. Kritik terhadap peraturan tersebut bisa dianggap anti-Islam atau mengganggu filosofi agama. Selain itu, Malaysia yang masih semi demokratis dimana pemerintahan masih dikuasai pihak-pihak yang sama membuat perkembangan dalam bidang hak asasi manusia juga tidak mengalami banyak kemajuan. Kondisi ini juga ditambah dengan sejumlah peraturan-peraturan di Malaysia yang digunakan untuk membatasi dan menahan pihak-pihak yang mengkritik isu-isu sensitif terutama isu agama dan isu politik. Adanya peraturan-peraturan tersebut semakin melegitimasi pemerintah untuk membatasi pergerakan organisasi-organisasi sipil yang mengadvokasi penghapusan hukuman mati di Malaysia.

Oleh karena itu, menurut Keck dan Sikkink dibutuhkan dukungan dan tekanan baik dari dalam dan luar Malaysia. Sebagaimana dalam konsep jaringan advokasi transnasional oleh Keck dan Sikkink, terdapat empat taktik dalam menganalisis advokasi penghapusan hukuman mati di Malaysia, yakni information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics. Dalam information politics, Amnesty International berusaha mengumpulkan dan mengelola informasi penerapan hukuman mati yang dirahasiakan pemerintah dalam bentuk death sentences and executions report. Selain itu, Amnesty International juga bekerjasama dengan aktor transnasional lainnya, seperti World Coalition Against the Death Penalty (WCADP) dan Harm Reduction International dalam mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai terpidana mati narkoba. Amnesty International dan aktor transnasional lainnya berusaha untuk mempengaruhi opini publik

melalui taktik politik informasi. Informasi-informasi tersebut dikumpulkan untuk mengungkapkan fakta terjadinya ketidaktransparan pemerintah akan eksekusi mati dan jumlah terpidana mati di Malaysia yang selama ini terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- ADPAN. (2017.). ADPAN'S Malaysian National Conference Brief Report. Diakses 01 Juni 2019. <https://adpan.org/2017/12/10/adpans-malaysian-national-conference-brief-report>
- ADPAN. (nd.). Unfair Trials Report.”diakses 6 Mei 2019 <https://adpan.org/unfair-trials>.
- Amnesty International. (2019). Abolitionist Reflections. Diakses 01 Mei 2019. <https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5073502017ENGLISH.pdf>
- Amnesty International.(nd.). Amnesty International Campaigning Manual. Diakses 11 Juni 201 <https://www.amnesty.org/download/Documents/120000/act100022001en.pdf>
- Amnesty International. (2015). Amnesty International Global Report: Death Sentences and Executions 2015. Diakses 23 Maret 2019
”<https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5034872016ENGLISH.PDF>
- Amnesty International. (2017). Amnesty International Global Report: Death Sentences and Executions 2016. Diakses 24 Maret 2019
<https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5057402017ENGLISH.PDF>
- Amnesty International. (2018) . Amnesty International Global Report: Death Sentences and Executions 2017. Diakses 24 Maret 2019
<https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF>
- Aziz, S.(2015). “The Continuing Debate on The Death Penalty: An Exposition of International, Malaysian, and Shari’ah Perspective.” IIUM Law Journal 23,no. 1.
<https://www.researchgate.net/publication/280880650>
- Dhillon, et al. (2012). Capital Punishment in Malaysia and Globally: A Tool for Justice or a Weapon Against Humanity. Malaysian Current Law Journal
1https://www.researchgate.net/publication/234659634_CAPITAL_PUNISHMENT_IN_MALAYSIA_AND_GLOBALLY_A_TOOL_FOR_JUSTICE_OR_A_WEAPON_AGAINST_HUMANITY.
- Harring, S. (1991). Death, Drugs and Development: Malaysia’s Mandatory Death Penalty for Traffickers and the International War on Drugs. Columbia Journal of Transnational Law 29
https://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1315&context=cl_pubs

- International Bussiness Publications. (2014). Malaysia Justice System and National Police Handbook, vol.1. International Bussiness Publications. Diakses 2019:
<https://books.google.co.id/books?isbn=1433031760>
- Juwita, N.P., Priadarsini, N.W., dan Resen, P. (2017). *Upaya Cultural Framing Suara Rakyat Malaysia Untuk Mendapat Dukungan Bagi The Abolish ISA Movement*. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 01 No. 01.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/35436>.
- Jamaluddin, L. (2019) .Advokasi Penghapusan Hukuman Mati di Malaysia. Hasil Wawancara Pribadi: 19 Juni 2019, wawancara online melalui email.
- Harm Reduction International. (2015). The Death Penalty for Drug Offences: Global Review 2015. Annual Report, 2015 edition. Ddiakses 20 Agustus 2019
https://www.hri.global/files/2015/10/07/DeathPenaltyDrugs_Report_2015.pdf
- Harm Reduction International. (2018). The Death Penalty for Drug Offences: Global Review 2017. Annual Report, 2016-2017 edition. diakses 20 Agustus 2019
<https://www.hri.global/files/2018/11/13/HRI-Death-Penalty-Report-2018-v2.pdf>
- Harm Reduction International. (2019). The Death Penalty for Drug Offences: Global Review 2018. Annual Report, 2018 edition. Diakses 20 Agustus 2019
https://www.hri.global/files/2019/02/22/HRI_DeathPenaltyReport_2019.pdf
- Keck, M. E. & Sikkink, K. (1998) *Activist Beyond Borders Advocacy Networks in International Politics*. Cornell University Press.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. *Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics*. Blackwell Publishers..
- Kaelimuthu, S. D. (2019) . Advokasi Penghapusan Hukuman Mati di Malaysia. Hasil Wawancara Pribadi: 19 Juni 2019, wawancara online melalui email.
- Malaysian Bar. (2016). Launch of the #AbolishDeathPenalty Campaign 2016. Diakses 11 Juli 2019. 103
http://www.malaysianbar.org.my/human_rights/launch_of_the_abolishdeathpenalty_campaign_2016_19_oct_2016.html?date=2018-12-01
- Malaysian Bar. (2016). Opening Address by Karan Cheah Yee Lyn, Secretary of the Malaysian Bar, at the Launch of the #Abolish Death Penalty Campaign 2016. Diakses 01 April 2018.
http://www.malaysianbar.org.my/speeches/opening_address_by_karen_cheah_yee_lynn_secretary_of_the_malaysian_bar_at_the_launch_of_the_abolishdeathpenalty_campaign_2016_19_oct_2016.html?date=2017-11-01
- Malaysian Bar. (2015). Speeches by Steven Thiru, President of the Malaysian Bar at the Asian Regional Congress on the Death Penalty. Diakses 02 Agustus 2019
http://www.malaysianbar.org.my/speeches/speech_by_steven_thiru_president_of_the_malaysian_bar_at_the_asian_regional_congress_on_the_death_penalty_renaissance_hotel_kuala_lumpur_11_june_2015.html

- Mohammad, M. (2017). Contesting Syariah Laws in Malaysia: Religion, Human Rights and the State's Response. *Journal of Politics and Law* Vol 10 Ed. <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jpl/article/view/72152>.
- Nadzri, M. (2018). *The 14th General Election, the Fall of Barisan Nasional, and Political Development in Malaysia, 1957-2018*. *Journal of Current Southeast Asian Affairs* Vol 37 ed. 03. <https://journals.sub.unihamburg.de/giga/jsaa/article/view/1151/1158>.
- Siswanto, A. (2009). *Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM
- Pakatan Harapan. Buku Harapan: Rebuilding Our Nation Fulfilling Our Hopes. Diakses 10 augustus 2019 https://kempen.s3.amazonaws.com/manifesto/Manifesto_text/Manifesto_PH_EN.pdf
- Risse, et. al. (1999). *The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change*. Cambridge University Press.
- United Nations. (nd.). How to Apply for consultative status with ECOSOC. Diakses 11 Juni 2019 <https://www.un.org/development/desa/dspd/civil-society/ecosoc-status.html>
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (nd.). Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty. Diakses 20 Juni 2019 <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/protection.pdf>
- United Nations Human Rights Council. (nd.). Universal Periodic Review Second Cycle Malaysia Reference Documents. Diakses 21 Maret 2019. <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMYStakeholdersInfoS17.aspx>
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (nd.). UN rights expert urges Malaysia to halt imminent execution of two brothers. Diakses 26 Maret 2019. <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21226&LangID=E>
- United Nations. (2018). Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Malaysia 2018. Diakses 10 Agustus 2019 <https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/001/96/PDF/G1900196.pdf?OpenElement>
- United Nations in Malaysia. (nd.). United Nations Treaties. Diakses 1 Juli 2019. http://www.un.org.my/un_treaties.aspx
- World Coalition Against the Death Penalty. (2015). The death penalty for drugs must go, it has no place in a civilized society. Diakses 12 Juni 2019 <http://www.worldcoalition.org/63709-The-death-penalty-for-drugs-must-go-it-has-no-place-in-a-civilised-society-.html>